



MUBA
VOCATIONAL
CENTER



DISNAKERTRANS
KAB. MUBA

JOB FAIR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun **2023**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Kol. Wahid Udin Lk II Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
e-mail: disnakertransmuba@gmail.com , Fb: [@disnakertransmuba](https://www.facebook.com/disnakertransmuba)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2022 sebagai diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke-4 (empat) dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026. LKjIP disusun berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjaran dari Rencana Strategis 2023-2026.

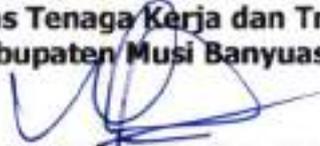
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimasing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang melalui Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sekayu, Januari 2024

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin**


H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312008031001



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
2.1. Struktur Organisasi	2
C. Kondisi Kepegawaian	6
D. Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan utama yang dihadapi	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	11
1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	12
1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
B. Perjanjian Kinerja	14
C. Rencana Anggaran	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi	17
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Analisis Anggaran	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Permasalahan	40
C. Tindak Lanjut	41

LAMPIRAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKJIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan atas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan sumber daya dan kebijakan yang



dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan pembandingan hasil pengukuran Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
2. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan bagi pihak lain yang membutuhkan;
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

2. GAMBARAN ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

2.1. Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksanaan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya, kewenangan pemerintah daerah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui



Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok pemerintah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

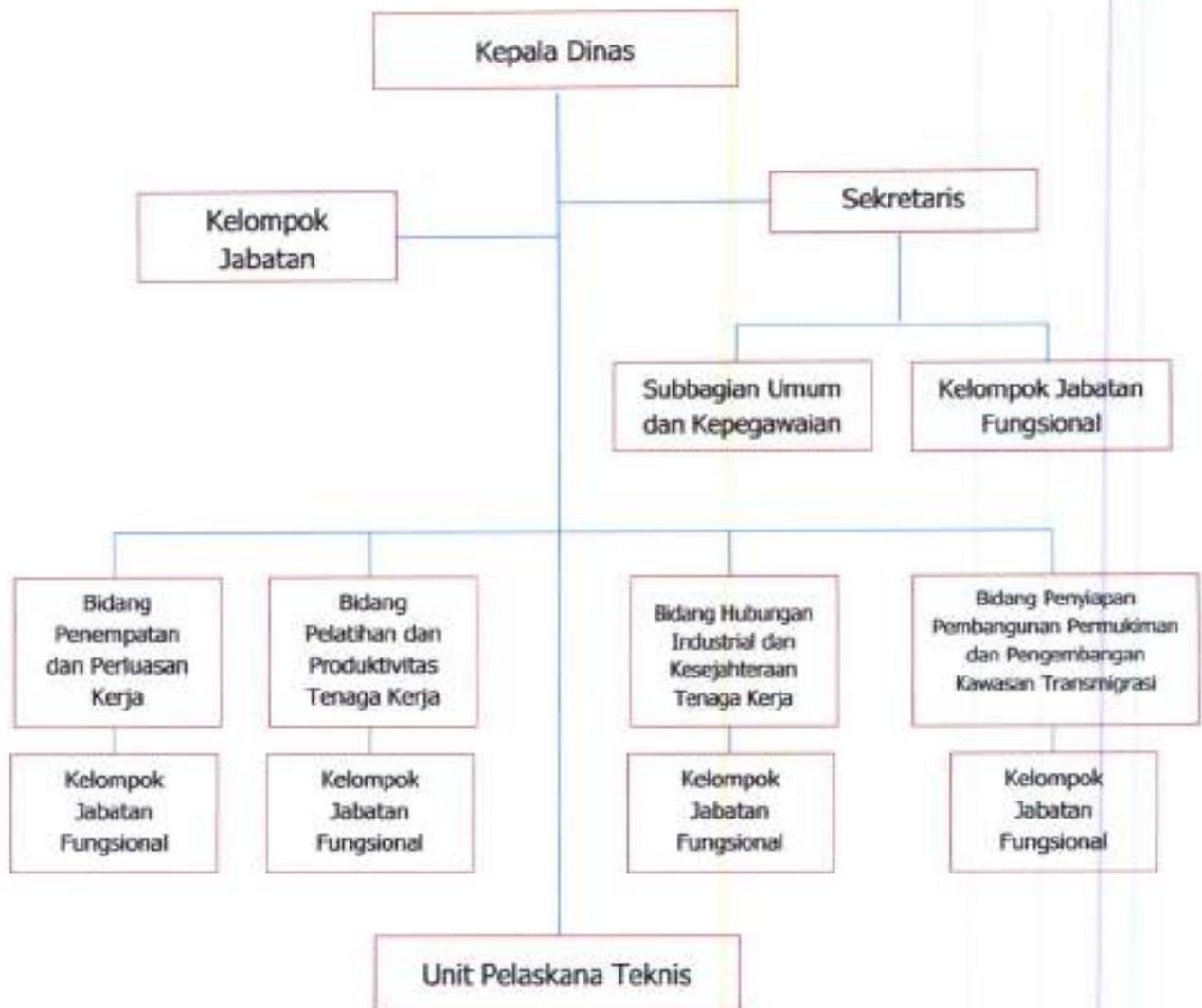
- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. Musi Banyuasin



Adapun tugas masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan Kebijakan dan perencanaan teknis serta menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kesekretariatan, menyelenggarakan urusan umum perlengkapan dan kepegawaian, perencanaan,



keuangan dan pelaporan, hubungan masyarakat, serta mengoordinasikan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program pembinaan informasi pasar kerja, penempatan/penyediaan tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja, usaha mandiri dan terapan teknologi tepat guna, perluasan lapangan kerja, pembinaan terhadap tenaga kerja asing dan purna kerja.

d) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Program pelatihan kerja, pembinaan sertifikasi dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan pemagangan.

e) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya melakukan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerja sarana bipartite dan tripartite, pembinaan hubungan industrial, pelaksanaan hubungan kerja dan persyaratan kerja, pembinaan pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, jaminan social tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, merencanakan dan melaksanakan program pembinaan ketenagakerjaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

f) Kepala Bidang Penyiapan Pembangunan, Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Bidang Penyiapan Pembangunan, Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang Penyiapan pembangunan, permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi, social budaya dan kelembagaan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa sub-substansi yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku coordinator pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
 - (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu coordinator dalam penyusunan rencana, pelaksana dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
 - (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. KONDISI KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kumpulan dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat / golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023-2026. Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Muba

NO	URAIAN	ASN		Honorer		JUMLAH
		L	P	L	P	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUBA						
1.	Sekretariat	3	4	15	4	
2.	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	2	5	1	2	
3.	Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	1	4	1	2	
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	7	2	1	2	
5.	Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	3	1	-	
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS						
1.	Balai Latihan Kerja	4	2	1	2	
2.	Unit Pemukiman Transmigrasi	2				
JUMLAH		22	20	20	12	

Berdasarkan Jenis kelamin, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin berjenis kelamin laki-laki 42 orang (57,89%) sedangkan perempuan sebanyak 32 orang (42,11%).

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Muba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DII/ DIII	SMA	SMP	SD	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUBA								
1.	Sekretariat	2	9	3	7		1	
2.	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	1	4	1	3			
3.	Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	5	1	1	1			
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4	6	1	1			
5.	Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3	3	-	1			
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS								
1.	Balai Latihan Kerja	1	4		2			
2.	Unit Pemukiman Transmigrasi		1		1			
JUMLAH		16	28	6	16		1	

Berdasarkan tingkat Pendidikan untuk pendidikan S2 sebanyak 16 orang (39,53%), pendidikan S1 sebanyak 28 orang (53,91%), Pendidikan DII/DIII 5 orang (9,30%), Pendidikan SMA 16 orang (20,93%) dan Pendidikan SD 1 orang (2,33%).

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Muba Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Unit Kerja	Struktural Eselon			Jumlah	Fungsional
		II	III	IV		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
KAB. MUBA						
1.	Sekretariat	1	-	1		
2.	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	-	1	1		
3.	Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	-	1	3		
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	-	1	3		
5.	Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	1	1		
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS						
1.	Balai Latihan Kerja	-	-	2		
2.	Unit Pemukiman Transmigrasi	-	-			
JUMLAH		1	4	11		

Berdasarkan jabatan Struktural, Jabatan Eselon II berjumlah 1 orang, jabatan Eselon III sebanyak 4 orang, dan Jabatan Eselon IV sebanyak 11 orang.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Muba Berdasarkan Pangkat Golongan

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOL										
		IV.C	IV.B	IV.A	IIID	III.C	II.B	III.A	IID	II.C	II.B	I.C
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUBA												
1.	Sekretariat	1	-	1	-	1	1	2	1			
2.	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja				1	2		1	1			1
3.	Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja			3	1		1					
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja			1	4	1	1	2				
5.	Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1	2	1		1	1			
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS												
1.	Balai Latihan Kerja			1		1		3	1			
2.	Unit Pemukiman Transmigrasi				1	1					1	
JUMLAH												



Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dukungan aparatur yang kompeten dan profesional sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan Publik. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain :

1. Kemampuan bahasa asing, untuk melakukan komunikasi untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Penguasaan Teknologi dan informasi

4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI

Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ke 1 "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif" Indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan penyerapan lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif.

Adapun permasalahan yang sedang dihadapi dalam pencapaian tujuan :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi
2. Pertumbuhan dunia kerja dari sektor pertanian berkembang kearah agrobisnis (pertanian secara umum) sakan lebih menggunkan teknologi yang padat modal dari pada padat karya;
3. Tingkat Pendidikan dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang mengakibatkan sedikitnya kesempatan berusaha / kerja.;
5. Ketidak seimbangan antara penempatan tenaga kerja dan jumlah pencari kerja
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan.

- 
7. Pertumbuhan ekonomi dan investasi cukup tinggi, akan tetapi di sisi lain belum berdampak positif pada pengurangan angka pengangguran secara signifikan
 8. Oversupply Mahasiswa/Siswa, dimana banyak lembaga pendidikan mengambil jumlah siswa melebihi yg dibutuhkan pasar industri
 9. Terjadi Miss Match Jurusan dan Kurikulum
 10. Soft skill yang tidak memenuhi standar industri

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 mengandung Tujuan dan Sasaran dan Strategis Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis bertujuan untuk :

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan.
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan.
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan dan Program pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan kewenangan OPD sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja OPD.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/205/ KTPS/I/DISNAKERTRANS/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023.

1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dengan indikator tujuan angka kemiskinan, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pelayanan Infrastruktur untuk menyelesaikan isu strategis terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan peningkatan ketahanan ekonomi serta penguatan dukungan infrastruktur untuk perekonomian dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan tercapainya indikator tujuan tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yang inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu berdaya saing menghadapi tantangan global.
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan isu strategis peningkatan tata Kelola pemerintahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Tabel 2.1
Keterkaitan RPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		
	Uraian Outcome	Formulasi/cara perhitungan	Sumber data
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	BPS Kab. Muba
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	$IPK : I.PIK+I. PdTK+I.KK+I.PKK+ I. Prod +I.HI+I.KLK+I.Upah+ I.JSTK$	BPS Kab. Muba
	Persentase Pekerja yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	Jumlah Pencari Kerja mendapatkan Pelatihan dibagi dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	Jumlah Sarana yang diperbaiki dibagi jumlah target sarana dan prasana dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahun	Jumlah perselisihan dalam tahun n dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Kali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sarana yang dibangun/ diperbaiki Jumlah Total Sarana dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi	Jumlah yang dibina dibagi dengan Jumlah KK Transmigran dalam UPT Bina dikali 100%	Disnakertrans Kab. Muba
	Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	Jumlah KK Transmigranyang dibina dibagi jumlah KK transmigran dalam UPT Bina	Disnakertrans Kab. Muba

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Bupati Musi Banyuasin dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mewujudkan target tahun ke pertama dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2023.

Dengan Perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,8
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	52
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	42,60
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	24,1
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	50
2	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	%	7,8
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	41
3	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	22
		Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	%	49
		Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	%	100

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Langsung APBD Per Sasaran Strategis

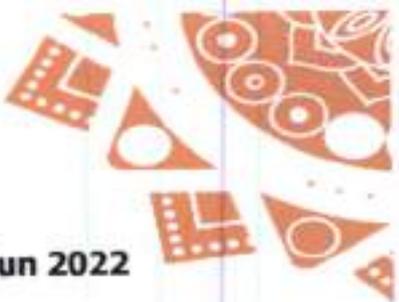
No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.277.249.620	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	404.578.100	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.507.342.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	856.057.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	1.328.810.000	APBD
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	149.271.200	APBD
	Jumlah	21.985.727.920	

C. Rencana Anggaran

Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kerja seluruh eselon dilingkungan Disnakertrans Kab. Muba, mulai dari level pejabat tertinggi eselon II sampai ke eselon IV berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Disnakertrans Kab. Muba mendapat dukungan anggaran murni APBD tahun 2023 Rp. 21.985.727.920 kemudian menjadi Rp. 23.017.847.523.

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Langsung APBD Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	APBD	
		Murni	Perubahan
1.	Menurunnya Angka Pengangguran	12.230.397.100	11.767.977.100
2.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	1.328.810.000	1.328.810.000
3.	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	149.271.200	149.271.200
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	8.277.249.620	9.7711.789.223
	JUMLAH	21.985.727.920	23.017.847.523



Tabel 2.5
Anggaran Belanja Langsung APBD Perubahan Tahun 2022
Per sasaran Startegis

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.771.789.223	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	404.578.100	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.507.342.000	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	856.057.000	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	1.328.810.000	APBD
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	149.271.200	APBD
	Jumlah	23.017.847.523	

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang diperlukan dalam system akuntabilitas kinerja adalah berpedoman keada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta RPJMD.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91 %	Sangat Baik
2	76 – 90,99 %	Baik
3	66 – 75,99 %	Cukup
4	51 – 65,99 %	Kurang
5	< 50,99 %	Sangat Kurang

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan gambaran penilaian kelompok Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, dalam mendukung Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ke 1 "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif" Indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Bupati Musi Banyuasin serta tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mengurangi jumlah pengangguran pada tahun 2023, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,8	2,58	132,10	Sangat Baik
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	52	55,97	107,64	Sangat Baik
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	42,60	47,78	112,16	Sangat Baik
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	24,1	47,46	196,92	Sangat Baik
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	50	15	30	Sangat kurang
2	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	%	7,8	6,03	122,69	Sangat Baik
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	41	55,87	136,26	Sangat Baik
3	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	%	22	22	100	Sangat Baik
		Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	%	49			
		Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	%	100	100	100	Sangat Baik

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, visi dan misi mengacu pada visi dan misi Bupati Musi Banyuasin yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase tingkat pengangguran.

Berdasarkan data BPS tahun 2023 pada Bulan Agustus 2023 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) 3,8 % masih dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 2,58 % adapun realisasi capaian sebesar 132,10% dalam kategori Sangat baik.

Sasaran 1

Menurunnya Angka Pengangguran

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan mengurangi jumlah pengangguran. Hal-hal yang dilakukan dalam rangka mengurangi pengangguran yaitu meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dengan cara meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan serta meningkatkan penempatan tenaga kerja.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,8	2,58	132,10	Sangat Baik
		Indeks Pembangunan Ketanagkerjaan	Indeks	52	55,97	107,64	Sangat Baik
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	42,60	47,78	112,16	Sangat Baik
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	24,1	47,46	196,92	Sangat Baik
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	50	15	30	Sangat kurang

Sasaran menurunnya angka pengangguran dapat dilihat pada tabel diatas 5 indikator sangat baik dan 1 indikator sangat kurang, berikut penjelasan capaian setiap indikatornya :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. Sesuai dengan namanya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan jumlah penduduk menganggur di suatu wilayah dimana berdasarkan konsep seseorang dikatakan menganggur apabila memenuhi kondisi sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 sebesar 2,58 % yang artinya masih terdapat sebanyak 2,58% masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin yang berstatus pengangguran dari jumlah Angkatan Kerja. Dimana perbandingan ini sebanyak 8.708 orang pengangguran dengan jumlah angkatan kerja sebesar 337.191 orang (*sumber: BPS. Kab. Muba, 2024*). Meskipun demikian, angka ini menunjukkan masih dibawah target 3,8 % persentasi capaian sebesar 132,10% kategori sangat baik.

2. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di suatu daerah. Aspek yang diukur dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terdiri dari 9 indikator utama yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan diperoleh dari penjumlahan 9 indikator utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPK = I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I.HI + I.KLK + I.UPAH + I.JSTK$$

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin yang tahun 2023 menghasilkan nilai indeks sebesar 55,97. Angka ini masih berada pada kategori menengah bawah. Meskipun demikian angka ini masih target capaian Indeks Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebesar 52 dengan persentasi capaian sebesar 107,64%. Jika dilihat berdasarkan masing-masing indikatornya terdapat beberapa indikator utama yang masih perlu ditingkatkan misalnya indikator hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta indikator.

3. Persentase Pekerja yang ditempatkan

Persentasei Pekerja yang ditempatkan dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pekerja yang ditempatkan} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$$

Pada tahun 2023 diperoleh Persentase Pekerja yang ditempatkan Kabupaten Musi banyuasin sebesar 47,78 persen, dimana perbandingan sebanyak 462 orang pencari kerja yang ditempatkan dengan sebanyak 967 orang pencari kerja yang terdaftar. Realisasi ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 42,60% capaian sebesar 112,16% kategori sangat baik.

4. Persentase Tenaga Kerja Terlatih

Persentase Tenaga Kerja terlatih adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Terlatih} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100$$

Persentase Tenaga Kerja terlatih tahun 2023 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 47,46 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kompetensi sebanyak 459 orang terdiri dari pelatihan dan sertifikasi Migas, Sertifikasi Pekerja Perkebunan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Pertukangan dengan jumlah pencari kerja sebanyak 967 orang. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 24,1%. Persentasi capaian sebesar 196,92%.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja didapat dari perbandingan antara jumlah sarana yang dibangun/diperbaiki di bagi dengan jumlah total sarana tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja} \times \text{Jumlah Total Sarana}}{\text{Jumlah Sarana yang dibangun/diperbaiki}} \times 100$$

Pada tahun 2023 capaian persentase peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja sebanyak 3 buah sarana yang dibangun/diperbaiki (ruang Aula BLK, Penataan Halaman dan Rehab Ruang Workshop UPT Balai Latihan Kerja).

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan capaian kinerja sasaran menurunnya angka pengangguran rentan waktu tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2021-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44%	3,99%	4,24%	4,40%	3,8%	2,58%
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	50	51,04	55	52,95	52	55,97
		Rasio Penduduk yang bekerja	84%	66,42%	85%	67,99%	-	-
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,53%	69,18%	68,59%	71,12%	-	-
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	58	40,66	58	76,29	42,60	47,78
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	n/a	n/a	n/a	n/a	24,1	47,46
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	50	15

Capaian sasaran strategis menurunnya angka pengangguran setiap indikator mengalami fluktuatif untuk indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan target mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2023 adanya pengurangan indikator kinerja yaitu rasio penduduk yang bekerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Penambahan 2 indikator pada tahun anggaran 2023 yaitu persentase tenaga kerja terlatih dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja. Dilihat dari capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan realisasi dari 4,40% menjadi 2,58% penurunan jumlah pengangguran dari 15.241 orang menjadi 8.708 orang.

- c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Disnakertrans Kab. Muba**

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Target Tahun 2026	Persentase Capaian
			Target	Realisasi		
1.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8%	2,58%	3,35%	136,42%
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	52	55,97	55	101,76 %
		Rasio Penduduk yang bekerja	-	-	-	-
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	-
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60	47,78	47,80	99,95%
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	24,1	47,46	27	175,77%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	50	15	100	15 %

Tahun 2023 merupakan tahun ke-1 atau pertama implementasi Renstra dimana 6 indikator empat indicator persentasi capaian sudah diatas kategori sangat baik dan ada empat indicator persentasi capaian sudah diatas 100%, dilihat disini indikator peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja capaian masih 15% diharapkan dimasa mendatang capaian indikator sesuai dengan direncanakan sebesar 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi %	Capaian %
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,8	2,58	132,10
		Indeks Pembangunan Ketanagkerjaan	Indeks	52	55,97	107,64
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	42,60	47,78	112,16
		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	%	24,1	47,46	196,92
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	%	50	15	30

Penyebab terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2022 ke tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,4% menjadi 2,58% ini menunjukkan bahwa dari 15.241 orang pengangguran di tahun 2022 menurun menjadi 8.708 orang. Penyebabnya menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dikarenakan peningkatan lapangan pekerjaan dan bantuan usaha bagi masyarakat baik dari pemerintah maupun swasta (sumber BPS Kab. Muba tahun 2024).

Jika dilihat tingkat pengangguran menurun tetapi masih menjadi permasalahan penempatan tenaga kerja :

1. Kualitas pekerja yang relative masih rendah ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja
2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
3. Tidak seimbang antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.
4. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sector informal/ non formal.

Upayah yang dilakukan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi pelatihan Migas di PPSDM Cepu pada tahun anggaran 2023. adapun jurusan pelatihan yang dilaksanakan :

No	Jurusan	Jumlah Peserta	Sertifikasi yang terima
1.	Pelatihan Juru Les	20 orang	Sertifikasi BNSP
2.	Pelatihan Juru Ikat Beban	50 orang	
3.	Pelatihan Operator Scaffolding	43 orang	
4.	Pelatihan Operator Lantai Perawatan Sumur	48 orang	
5.	Pelatihan Teknisi Sistem Utilitas	30 orang	
6.	Pelatihan Operator Froklift	20 orang	
	Jumlah	211 orang	

Pelatihan yang di laksanakan di UPT Balai Latihan Kerja sekayu

No	Jurusan	Jumlah Peserta	Sertifikasi yang terima
1.	Pelatihan Sertifikasi Pemanen Buah Sawit	20 orang	Sertifikasi BNSP
2.	Pelatihan Sertifikasi Pertukangan	100 orang	
	Jumlah	120 orang	



Peserta Pelatihan Sertifikasi Migas di Cepu



Peserta Pelatihan Sertifikasi Pertukangan



Peserta Pelatihan Sertifikasi Pemanen Sawit

2. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam rangka peningkatan penempatan tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, melakukan langkah-langkah :

- a. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penempatan tenaga kerja lokal, pelatihan tenaga kerja lokal dan pengawasan ketenagakerjaan.

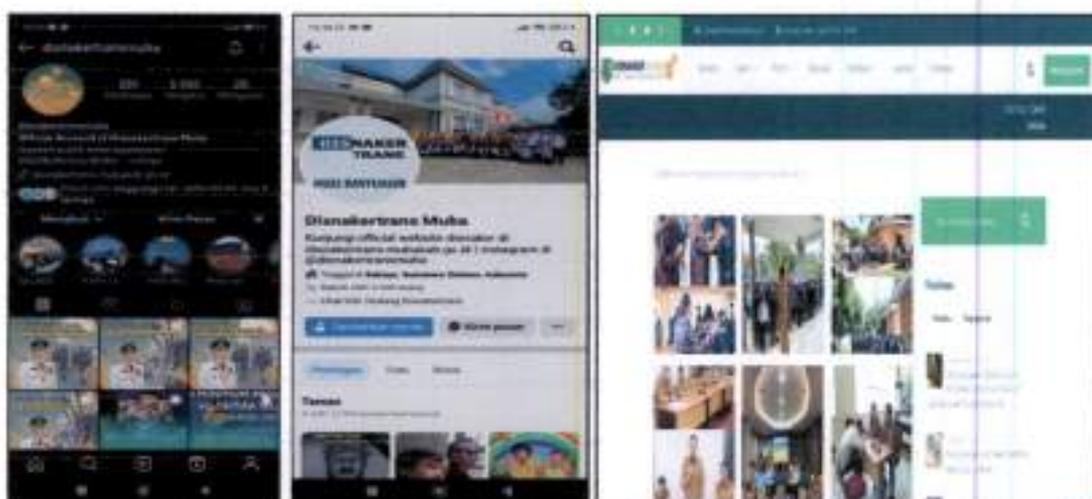


Tabel
Sinergi Disnakertrans Kab. Muba dengan berbagai Pihak

No	Perusahaan/Lembaga	Jumlah
1.	Perusahaan Bidang Perkebunan	28
2.	Perusahaan Bidang Pengolahan	5
3.	Perusahaan Bidang Pertambangan	6
4.	Perusahaan Bidang Kelistrikan	3
5.	Perusahaan Bidang Perbankan	2
6.	Perusahaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM)	1
7.	Perusahaan Bidang Perdagangan	2
8.	Perusahaan Bidang Akomodasi	1
9.	Perusahaan Bidang Pengamanan	1
10.	BP2MI	1
11.	Lembaga Pendidikan	1
12.	SKK Migas Sumbagsel	1

b. Melakukan Penyebaran Informasi Pasar Kerja melalui Online

Dalam rangka penyebaran Informasi Pasar Kerja/ lowongan kerja pada tahun 2023 upayah dilakukan dengan cara penyebaran informasi menggunakan media social online facebook (<http://www.facebook.com/disnakertransmuba>), instagram (<https://instagram.com/disnakertransmuba>), website: disnakertransmuba@gmail.com Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga informasi yang disampaikan lebih luas, mengingat sekarang ini media social sebagai alat komunikasi yang paling efektif.



c. Melakukan Job Carvasing

Melakukan pendataan lowongan kerja di perusahaan agar diketahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan kualifikasi tenaga kerja, pada tahun 2023 dilaksanakan kepada 15 Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin didapat 56 lowongan jabatan yang tersebar di 15 Perusahaan.

d. Melakukan Sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) se Kabupaten Musi Banyuasin melalui bimbingan kepada BKK yang di SMK agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan program penempatan tenaga kerja serta memberikan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pelajar yang akan menyelesaikan pendidikan untuk siap masuk didunia kerja.



Pembinaan oleh Fungsional Pengantar Kerja Ke BKK SMK

e. Pelaksanaan Job Fair

Dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja, bersama dengan pelaksanaan Muba Expo tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Job Fair yang diadakan dari tanggal 27 September s.d 2 November 2022



Pada Tahun 2023 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 967 orang dan jumlah penempatan tenaga kerja sebanyak 462 orang.

Tabel.2.10
Bursa Kerja Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2023

No	PERUSAHAAN	LULUS	KETERANGAN
1	PT. BINA SARANA SUKSES	2 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
2	PT. SUPRACO INDONESIA	3 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
3	PT. DSSP POWER SUMSEL	3 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
4	PT. PETRO MUBA	3 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
5	PT. LONDON SUMATERA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
6	PENCAKER MELAPOR	2 Org	Sudah bekerja di RSUD Sungai Liri
7	PT. SUPRACO INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
8	PT. MENARA SENTRAREJEKI	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
9	PT. SEJATI PALMA SEJAHTERA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
10	PT. SWAPRO INTERNATIONAL	1 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
11	PT. BERKAT SAWIT SEJATI	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
12	PT. SUPRACO INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
13	PT. GLOBAL ORBIT BERSAMA	30 Org	Proses Langsung ke Perusahaan
14	BKK SMK N 1 SEKAYU	- Org	Dalam Proses BKK
15	BKK SMK N 3 SEKAYU	- Org	Dalam Proses BKK
16	BKK SMK N 1 TUNGKAL JAYA	- Org	Dalam Proses BKK
17	PT. NAWAKARA	1 Org	Sudah diterima bekerja
18	PT. MEDCO E&P INDONEISA	1 Org	Sudah diterima bekerja
19	PT. PULAU SAMBU (GUNTUNG)	1 Org	Sudah diterima bekerja

No	PERUSAHAAN	LULUS	KETERANGAN
20	PT. GLOBAL ORBIT BERSAMA	24 Org	Proses Langsung ke Perusahaan
21	BANK CENTRAL ASIA	1 Org	Proses Langsung ke Perusahaan
22	PT. GLOBAL ORBIT BERSAMA	- Org	Proses Langsung ke Perusahaan
23	PT. SEJATI PALMA SEJAHTERA	6 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
24	PT. SUPRACO INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
25	PT. CIPTA KRIDA BAHARI	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
26	PT. LERINDRO INTERNATIONAL	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
27	PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
28	PT. SUPRACO INDONESIA	1 Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
29	PT. WILMAR INTERNATIONAL PLANTATION	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
30	PT. GLOBAL ORBIT BERSAMA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
31	PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
32	PT. PINANG WITMAS SEJATI	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
33	PT. DSSP POWER	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
34	BKK SMK N 1 LAIS	18 Org	Penempatan oleh PT. Jafa Indo Corpora
35	BKK SMK N 1 LAIS	10 Org	Penempatan pada PT. Advantage SCM
36	BKK SMK N 1 LAIS	4 Org	Penempatan pada Bank Mas Palembang
37	PT. HINDOLI	1 Org	Sudah diterima bekerja
38	PT. LERINDRO INTERNATIONAL	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
39	PT. LERINDRO INTERNATIONAL	58 Org	Proses Langsung ke Perusahaan
40	PT. SUPRACO INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
41	PT. WANAPOTENSI GUNA	25 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
42	PT. PINAGO UTAMA Tbk	11 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
43	PT. BERKAT SAWIT SEJATI	20 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
44	PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA	5 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
45	PT. HINDOLI @ CARGILL	5 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
46	PT. Jafa INDO CORPORA	35 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
47	PT. KIRANA MUSI PERSADA	2 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
48	PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk	27 Org	JOB FAIR Muba Expo 2023
49	PT. LERINDRO INTERNATIONAL	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
50	PT. SUPRACO INDONESIA	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
51	PT. NAWAKARA	1 Org	Sudah diterima bekerja
52	PT. PAMA PERSADA	1 Org	Sudah diterima bekerja
53	PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
54	PENCAKER MELAPOR	1 Org	Diterima P3K di RS Jambi
55	PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk	- Org	Penerimaan Berkas di Disnaker
56	BKK SMK N 1 LAIS	21 Org	Penempatan oleh BKK
57	BKK SMK N 1 SEKAYU	60 Org	Penempatan oleh BKK
58	CPMI	41 Org	Bekerja di Luar Negeri
59	BKK SMK N 1 LAIS	31 Org	Penempatan pada PT. Advantage SCM
JUMLAH		462 Org	

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023

Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Menurunnya Angka Pengangguran							
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8	2,58	132,10	11.767.977.100	9.106.421.828	77,38	115,76
b. Indeks Pembangunan Ketanagkerjaan	52	55,97	107,64				
c. Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60	47,78	112,16				
d. Persentase Tenaga Kerja Terlatih	24,1	47,46	196,92				
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	50	15	30				



a) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menunjuk pada implementasi sasaran kinerja "Menurunnya Angka Pengangguran" pada tahun 2023. Maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori "sangat baik". Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 22,62% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Aspek efisiensi pelaksanaan kinerja merupakan hasil dari perbandingan capaian rata-rata 5 indikator sebesar 115,76% dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 77,38%.

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor:732/KPTS-BPKAD/2023 Tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Tanggal 10 Nopember 2023 bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 821.811.890,-

b) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional yang membidangi sasaran pada sasaran menurunnya angka pengangguran dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang beban kinerja sasaran ini masih kurang 19 orang yang berasal dari Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan UPTD Balai Latihan Kerja sekayu.

Sasaran 2

Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan mengurangi pengangguran mendorong mewujudkan suasana hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan tenaga kerja. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :



a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	7,8	6,03	122,69	Sangat Baik
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41	55,87	136,26	Sangat Baik

1. Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Angka Sengketa pengusaha Pekerja Pertahun perbandingan antara jumlah sengketa dalam satu tahun dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Angka Sengketa Pengusaha pertahun} = \frac{\text{Jumlah Perselisihan dalam tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$$

Angka sengketa pengusaha pekerja tahun 2023 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 6,03 %, dimana perbandingan ini didapat jumlah perselisihan yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 26 Kasus terdiri dari 22 phk, 2 perselisihan hak dan 2 peselisihan kepentingan dengan jumlah perusahaan 431 perusahaan. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 7,8 %. Persentasi capaian sebesar 122,69%.

2. Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan

Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$$

Persentase pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 55,87 %, dimana perbandingan ini didapat

jumlah tenaga kerja yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35.276 orang dengan jumlah tenaga kerja 63.141 orang. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 41%. Persentasi capaian sebesar 136,26%.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan capaian kinerja sasaran menurunnya angka pengangguran rentan waktu tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2021-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	5,4	8,8	5,1	5,53	7,8	6,03
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	n/a	n/a	n/a	n/a	41	55,87

Capaian sasaran strategi "Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja" mempunyai 2 indikator dilihat dari realisasi bahwa tingkat perselisihan pada tahun 6,03% masih dibawah target dan indikator persentase pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sebesar 55,87% telah melebihi target sebesar 41%.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target akhir 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Tahun 2026	Persentasi Capaian
1.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	7,8	6,03	4,8	74,37 %
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41	55,87	71	78,69%

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa sasaran menurunnya angka sengketa pengusaha dan pekerja capaian diakhir tahun Renstra 2023-2026 capaian sebesar 76,53 % masih dalam kategori baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	7,8	6,03	122,69	Sangat Baik
		Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41	55,87	136,26	Sangat Baik

Dilihat dari persentasi realisasi Indikator Kinerja Angka Sengketa Pengusaha Pekerja pertahun capaian sudah mencapai 122,69 Kategori sangat baik dan indikator persentase pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 136,26 kategori sangat baik,

Perlu optimalisasi pemahaman perusahaan dan pekerja belum sepenuhnya paham/memahami mengenai aturan ketenagakerjaan dan masih kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam rangka menurunkan angka sengketa pengusaha pekerja pertahun adalah:

- a) Memberikan pemahaman dan penyuluhan serta sosialisasi kepada pihak perusahaan dan pekerja, mediator melakukan penyuluhan tentang peraturan ketenagakerjaan mengenai hak pekerja dan hak pemberi kerja.





- b) Penyelesaian kasus hubungan industrial mediator hubungan Industrial ketenagakerjaan melakukan pemanggilan para pihak yang berselisih untuk melakukan sidang mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Pada tahun 2023 sebanyak 26 kasus yang masuk 100% diselesaikan tingkat Tripartit.
- c) Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan, lembaga ini berfungsi sebagai wadah penyelesaian Hubungan Industrial di Perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan 2023 terbentuk 53 lembaga Bipartit dari 187 Perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit di perusahaan.
- d) Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:906/KPTS/ Disnakertrans/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebesar Rp. 3.547.745,- per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- e) Melakukan Forum Group Diskusi Bidang Ketenagakerjaan yang diikuti oleh Stakeholder pemangku kepentingan dibidang ketenagakerjaan, pembentukan forum HRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 515/KPTS-NAKERTRANS/2023 Tentang Pembentukan *Forum Human Resources Development (HRD)* Kabupaten Musi Banyuasin merupakan komunitas profesi di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2025 yang beranggotakan seluruh HRD perusahaan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Forum HRD ini dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dari masing-masing perusahaan baik internal maupun masalah eksternal perusahaan dan membangun sinergi dan program bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.





Pembentukan HRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2025

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

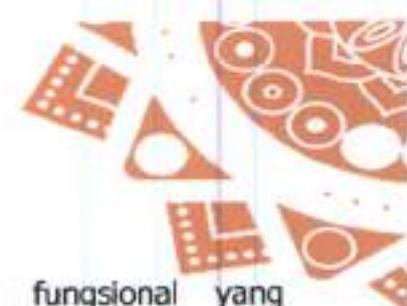
Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022

Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja							
Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahun	7,8	6,03	122,69	1.328.810.000	877.548.523	66,04	91,57
Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41	55,87	136,26				

a) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menunjuk pada implementasi sasaran kinerja "Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun" pada tahun 2023. Maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori "sangat baik" . Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 33,96 % dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Aspek efisiensi pelaksanaan kinerja merupakan hasil dari perbandingan capaian indikator sebesar 129,47% dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 91,57%.





b) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional yang membidangi sasaran pada sasaran Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun dengan hasil tingkat capaian 122,69% dan persentase pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sebesar 13berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang beban kinerja sasaran ini masih kurang 4 orang Mediator dan 7 orang ASN yang berasal dari Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Sasaran 3

Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas

Sasaran dalam rangka meningkatnya pembinaan ketransmigrasian yang berkualitas didukung 3 indikator capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Taget	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Terbinanya Transmigrasi	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	22	22	100	Sangat Baik
		Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	49	49	100	Sangat Baik

Capaian Indikator persentase transmigrasi umum yang ditempatkan dengan target 100% realisasi capaian 100% dimana jumlah KK Transmigran umum yang ditempatkan sebanyak 185 KK dan jumlah KK transmigran dalam UPT Bina sebanyak 185 KK.

Capaian indicator pembinaan warga transmigrasi target 100% realisasi capaian 100% dimana jumlah KK Transmigran yang dibina sebanyak 185 KK dan jumlah KK transmigran dalam UPT Binaan sebanyak 185 KK.



Penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Melakukan pembinaan masalah pertanian, pekerbunan, kewirausahaan, social budaya serta bimbingan mental spiritual.
2. Melakukan relokasi sebanyak 20 KK warga Binaan, dimana lokasi tempat tinggalnya setiap tahun mengalami bencana banjir sehingga dilakukan relokasi dari lokasi UPT Transmigrasi ke Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Mengusulkan perbaikan sarana prasarana di UPT Binaan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pembangunan fasillitas umum di UPT Binaan.
4. Memfasilitasi kegiatan Bidik misi bagi anak transmigran yang ada di Musi Banyuasin untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Negeri yang bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2023 yang mengajukan surat keterangan anak transmigran asli sebagai salah satu syarat program bea siswa dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berjumlah 11 orang dan yang lulus seleksi 5 orang masuk ke Universitas Negeri Islam Raden Fattah Palembang.

Tabel 3.12
Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022

Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
	Taget	Realisasi	Capaian %	Taget	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas							
Persentase Terbinanya Transmigrasi	100	100	100	149.271.200	114.889.164	76,97	100
Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	22	22	100				
Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	49	49	100				

a) Analsis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menunjuk pada implementasi sasaran kinerja "Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas" pada tahun 2023. Maka

dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori "sangat baik" , pada tahun anggaran 2023 pagu anggaran Rp.149.271.200 realisasi sebesar Rp. 114.889.164 atau sebesar 76,97% Berdasarkan anggaran perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 23,03% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Aspek efisiensi pelaksanaan kinerja merupakan hasil dari perbandingan capaian indikator sebesar 100% dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 100%.

b) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional yang membidangi sasaran pada sasaran Angka Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas tingkat capaian 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang beban kinerja sasaran ini masih kurang 7 orang ASN Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan 1 ASN UPT Transmigrasi Air Balui.

C. ANALISIS ANGGARAN

Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Rp. 23.017.847.523 (perubahan) realisasi anggaran atau serapan mencapai Rp.18.224.662.566 (79,18%) dengan demikian SILPA/ Sisa lebih sebesar Rp. 4.793.184.957 (20,82%).

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian
		Murni	Perubahan		
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	404.578.100	404.578.100	381.686.750	94,34

2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.969.762.000	10.507.342.000	8.060.563.945	76,71
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	856.057.000	856.057.000	664.171.133	77,58
4.	Program Hubungan Industrial	1.328.810.000	1.328.810.000	877.548.523	66,04
5.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	149.271.200	149.271.200	114.889.164	76,97
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.277.249.620	9.771.789.223	8.125.803.051	83,16
	Jumlah	21.985.727.920	23.017.847.523	18.224.662.566	79,18

Adanya efisiensi Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:732/KTPS-BPKAD/2023 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Efisiensi Sebesar Rp. 821.811.890,-

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
1	Menurunnya Angka Pengangguran	11.767.977.100	9.106.421.828	77,38	Efektif
2	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	1.328.810.000	877.548.523	66,04	Efektif
3	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	149.271.200	114.889.164	76,97	Efektif



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis tahun 2023-2026. Hasil laporan dapat disimpulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 3 sasaran 8 Indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dari total indikator sasaran telah dilaksanakan 7 indikator ($\geq 91\%$) kategori "**Sangat Baik**" dan 1 Indikator ($\leq 90,99\%$) kategori "**Baik**".

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 23.017.847.523 realisasi anggaran mencapai Rp. 18.224.662.566 atau 79,18 %, dengan SILPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp. 4.793.184.957 atau 20,82%. Hal ini merupakan upaya penghematan dari sisa selisih harga perkiraan dari beberapa kegiatan utama penunjang maupun teknis kegiatan utama.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada tahun 2023 berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

- 
1. Kualitas pekerja yang relative masih rendah ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja
 2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
 3. Tidak seimbangnya antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.
 4. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sector informal/ non formal.
 5. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 6. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan.
 7. Relokasi bagi warga binaan transmigrasi dikarenakan lokasi UPT sering terendam banjir perlu dilakukan relokasi perumahan warga transmigrasi.
 8. Pembangunan Fasilitas Umum di Unit Permukiman Transmigrasi

C. TINDAK LANJUT

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam capaian kinerja sebagai berikut :

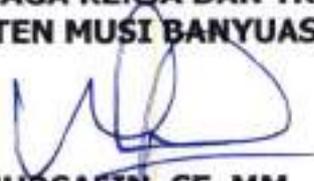
1. Optimalisasi Balai Latihan Kerja menjadi Muba Vocational Center(MVC)
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan Supporting Migas sesuai dengan permintaan pasar kerja.
3. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja
4. Melakukan Sinergi dengan berbagai pihak terkait penempatan tenaga kerja lokal, pelatihan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dengan penyebaran Informasi Bursa Kerja melalui media social facebook dan Instagram.
6. Meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja terkait peraturan ketenagakerjaan.
7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- 
8. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk
 9. Meningkatkan pembinaan dan kemandirian bagi warga transmigrasi
 10. Mengusulkan perbaikan dan pembuatan fasilitas Umum bagi warga transmigrasi baik melalui Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja yang akan datang.

Sekayu, Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312008031001**

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MURSALIN, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. APRIYADI

Jabatan : Pj. Bupati Musi Banyuasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



H. APRIYADI

Sekayu, Januari 2023

Pihak Pertama,



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	52
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8%
2	Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Tahunan	7,8%
3	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.277.249.620	
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	404.578.100	
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.969.762.000	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	856.057.000	
5	Program Hubungan Industrial	1.328.810.000	
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	149.271.200	
JUMLAH		21.985.727.920	

Pihak Kedua



H. APRIYADI

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUANDA, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris / Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MURSALIN, SE, MM
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,

JUANDA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

PEKJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Menurunkan Angka Sangketa Pengusaha dan Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Sangketa Pengusaha dan Pekerja Pertahani Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	7,8% 41%
2.	Terpenahinya Kebutuhan Pemunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100% 100% 100% 100%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Hubungan Industrial	1.328.814.000	
a.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	779.405.000	
	Penyediaan Kendaraan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	779.405.000	
b.	Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	549.405.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	378.010.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	171.395.000	
2.	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten / Kota	8.277.249.620	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	59.560.000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.867.917.567	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.385.000	
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.125.000	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.010.414.403	
f.	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.888.740	

g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	501.988.910	
	Jumlah Anggaran	9.606.059.620	

Pihak Kedua



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,



JUANDA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FITRY JUWITA SARY, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MURSALIN, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. MURSALIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,

Hj. FITRY JUWITA SARY, S.Si., M.Si.
Pembina
NIP.197304132000032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase Tenaga Kerja Terlatih dan Tersertifikasi.	24,1 %
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja.	50 %

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	10.969.762.000,-	
a.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.	10.969.762.000,-	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.		
	Jumlah Anggaran	10.969.762.000,-	

Pihak Kedua



H. MURSALIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
 NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
 Pihak Pertama,



Hj. FITRY JUWITA SARY, S.Si., M.Si.
Pembina
 NIP.197304132000032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD FANFANI SYAFRI, ST., MT
Jabatan : Kepala Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MURSALIN, SE, MM
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,

AKHMAD FANFANI SYAFRI, ST., MT
Pembina
NIP. 197506182002121008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	22 %
		Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi	49 %

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
	- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten	149.271.200	
	Jumlah Anggaran	149.271.200	

Pihak Kedua



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023
Pihak Pertama,



AKHMAD FANFANI SYAFRI, ST.,MT
Pembina
NIP. 197506182002121008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENDI SUHENDAR, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MURSALIN, SE, MM
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

DENDI SUHENDAR, S.E, M.Si
Penata TK. I
NIP. 19730603199031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen
		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	52
2	Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60%
		Pemeliharaan dan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	50 orang
		Pembinaan Bursa Kerja Khusus	24 BKK
		Laporan Keberadaan TKA	45 orang
		Job Canvassing	10 kali
		Rekrutmen Tenaga Kerja	10 perusahaan
		Job Fair/ Pameran Kesempatan Kerja	1 Kegiatan
		Rekomendasi Paspor dan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).	40 orang
		Pembinaan Wirausaha	1 Kegiatan

No.	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	404.578.100	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja		
	Pelayanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota		
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	227.484.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja online	134.320.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	494.253.000	
	Jumlah Anggaran	1.260.635.100	

Pihak Kedua



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197003312000031001

Sekayu, Januari 2023

Pihak Pertama,



DENDI SUHENDAR, S.E., M.Si
Penata TK. I
NIP. 19730603199031003



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor : B-004/16060/VS.600/01/2024
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Balasan Surat Permohonan Data Capaian

Sekayu, 8 Januari 2024

Kepada Yang Terhormat,
Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin
di
Sekayu

Sehubungan dengan surat Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin nomor P-800/01/1/Nakertrans/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal permohonan data capaian kinerja urusan ketenagakerjaan tahun 2023, bersamaan dengan surat ini kami sampaikan indikator ketenagakerjaan beserta penyebab kenaikan atau penurunan sebagaimana permintaan Saudara (data terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Musi Banyuasin**

Trio Wira Dharma

Lampiran:

Surat Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor : B-4/16060/VS.600/01/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

**Tabel 1 Data Capaian Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Perubahan 2022-2023 (%)	Penyebab Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah penduduk usia 15+	486.899	464.277	-4,65%	Dari hasil sakernas, terlihat terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam satu tahun terakhir.
2	Bukan angkatan kerja	140.621	127.086	-9,63%	Hal ini kemungkinan terjadi akibat aktifnya kembali system perkuliahan sehingga penduduk yang bersekolah keluar dan tidak tercatat di Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat dari tingginya penurunan penduduk bukan angkatan kerja dalam satu tahun terakhir.
3	Penduduk bekerja	331.037	328.483	-0,77%	Jumlah penduduk bekerja berkurang secara tidak signifikan pada satu tahun terakhir. Tidak bisa disimpulkan fenomena apa yang terjadi, karena dengan penurunan sekecil ini, bisa dianggap tidak terjadi penurunan dalam satu tahun terakhir.
4	Pengangguran	15.241	8.708	-42,86%	Peningkatan lapangan pekerjaan dan bantuan usaha bagi masyarakat baik dari pemerintah maupun swasta.
	Pengangguran laki-laki	9.616	5.504	-42,76%	
	Pengangguran perempuan	5.625	3.204	-43,04%	
5	Tingkat penganggiran terbuka (TPT)	4,40	2,58	-41,36%	Peningkatan lapangan pekerjaan dan bantuan usaha bagi masyarakat baik dari pemerintah maupun swasta. perempuan yang sebelumnya
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,12	72,63	2,12%	

No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Perubahan 2022-2023 (%)	Penyebab Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					mengurus rumah tangga, kini ikut berpartisipasi dalam dunia kerja, salah satunya melalui program bantuan modal usaha di 13 desa oleh Hindoli dan Yayasan CARE Peduli
7	Rasio Penduduk Bekerja terhadap penduduk usia kerja	0,68	0,71	4,06%	

Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

Tabel 2 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2023

No	Sektor	Distribusi Penduduk Bekerja (%)	Distribusi Penduduk Bekerja (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian	56,63%	186.021
2	Manufaktur	10,64%	34.961
3	Jasa	32,73%	107.501

Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

Tabel 3 Status Pekerjaan Utama Tahun 2023

No	Sektor	Persentase (%)	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berusaha sendiri	26,14%	85.872
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	14,13%	46.399
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	5,31%	17.438
4	Buruh/karyawan/pegawai	35,66%	117.139
5	Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	2,82%	9.250
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	15,95%	52.385

Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

Tabel 4 Formal/Informal Tahun 2023

No	Sektor	Persentase (%)	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Formal	40,97%	134.577
2	Informal	59,03%	193.906

Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

Tabel 5 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023

No	Sektor	Persentase (%)	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD ke bawah	40,67%	133.587
2	SMP	18,91%	62.105
3	SMA	26,92%	88.442
4	SMK	4,90%	16.088
5	Diploma I/II/III	1,62%	5.325
6	Univeritas	6,98%	22.936

Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
S/D BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA ANGGARAN (Rp)	KEMAJUAN / REALISASI BULAN DESEMBER		
			REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN KEUANGAN	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
02.07.10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	23.017.847.523,00	96,01	18.224.962.566,00	79,18
1.07.2.07.10.1.07.1	Program Perungjung urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	9.771.789.223,00	99,85	8.125.803.051,00	83,16
1.07.2.07.10.1.07.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.560.000,00	100	99.125.000,00	99,27
1.07.2.07.10.1.07.1.02.01.02.01.01	Perwujudan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.610.000,00	100	39.361.000,00	99,37
1.07.2.07.10.1.07.1.02.01.02.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	19.950.000,00	100	19.764.000,00	99,07
1.07.2.07.10.1.07.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.308.057.567,00	100	4.905.969.950,00	77,77
1.07.2.07.10.1.07.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asih	6.308.057.567,00	100	4.905.969.950,00	77,77
1.07.2.07.10.1.07.1.02.03	Kontribusi Barang Milik Daerah Pisco Perangkat Daerah	26.385.000,00	100	26.300.270,00	99,68
1.07.2.07.10.1.07.1.02.03.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	26.385.000,00	100	26.300.270,00	99,68
1.07.2.07.10.1.07.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.125.000,00	52,82	33.800.000,00	46,22
1.07.2.07.10.1.07.1.02.05.02.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100
1.07.2.07.10.1.07.1.02.05.02.05.09	Pembinaan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Dan Fungsi	43.125.000,00	20	3.800.000,00	8,81
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.260.830.806,00	100	1.198.173.307,00	95,11
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.01	Perbaikan komponen gedung dan komplek bangunan	19.997.286,00	100	19.955.200,00	99,79
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	343.331.377,00	100	342.639.100,00	99,8
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.667.731,00	100	47.953.000,00	96,74
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.029.283,00	100	134.885.813,00	99,9
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	104.322.129,00	100	90.274.350,00	86,53
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.06	Penyediaan barang-barang lain pemerintah	24.990.000,00	100	24.840.000,00	99,52
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.952.000,00	100	10.824.000,00	98,74
1.07.2.07.10.1.07.1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	572.564.000,00	100	528.201.844,00	92,25
1.07.2.07.10.1.07.1.02.08	Penyediaan Jasa Perungjung urusan pemerintahan Daerah	1.679.421.940,00	100	980.507.890,00	58,44
1.07.2.07.10.1.07.1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	333.658.740,00	100	236.634.662,00	70,92
1.07.2.07.10.1.07.1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.763.200,00	100	743.963.197,00	99,76
1.07.2.07.10.1.07.1.02.09	Pemeliharaan barang milik Daerah Perungjung urusan Pemerintahan Daerah	964.408.910,00	100	920.838.665,00	95,48
1.07.2.07.10.1.07.1.02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atas Lapangan Pemeliharaan/pelebaran gedung Kantor dan bangunan Lainnya	113.210.000,00	100	75.323.065,00	66,53
1.07.2.07.10.1.07.1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/pelebaran gedung Kantor dan bangunan Lainnya	824.258.910,00	100	815.048.600,00	99,37
	1. Rehabilitasi Gedung UPT BLK	361.838.910,00	100	359.062.600,00	99,23
	2. Pemeliharaan Gedung UPT BLK (P-APBD)	462.420.000,00	100	433.988.000,00	93,87
1.07.2.07.10.1.07.1.02.09.02.09.10	Pemeliharaan/pelebaran sarana dan prasarana Gedung Kantor Atas Bangunan Lainnya	26.940.000,00	100	26.465.000,00	98,24
1.07.2.07.10.1.07.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	404.578.100,00	100	381.686.750,00	94,34
1.07.2.07.10.1.07.2.02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (rtk)	404.578.100,00	100	381.686.750,00	94,34
1.07.2.07.10.1.07.2.02.01.02.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	404.578.100,00	100	381.686.750,00	94,34
1.07.2.07.10.1.07.3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.507.342.000,00	93,3	8.060.563.945,00	76,71
1.07.2.07.10.1.07.3.02.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	10.507.342.000,00	93,3	8.060.563.945,00	76,71
1.07.2.07.10.1.07.3.02.01.02.01.01	PROSES Pelaksanaan Periodik dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	10.507.342.000,00	93,3	8.060.563.945,00	76,71
	6. Pelatihan Teknis Personil BLUD BLK (P-APBD)	125.000.000,00	0	0	0
	7. Proses Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi dan Sertifikasi Teknis Sektor Usaha (P-APBD)	1.309.602.000,00	100	853.336.945,00	65,21
	8. Pelatihan dan Sertifikasi Juru ukat beban (P-APBD)	728.430.000,00	100	587.010.000,00	80,59
	9. Pelatihan dan Sertifikasi Juru ukat beban (P-APBD)	1.808.500.000,00	100	1.628.580.000,00	90,05

1	2	3	4	5	6
	10. Pelatihan dan Sertifikasi Juru Las (P-APBD)	1.584.580.000,00	100	1.584.580.000,00	99,97
	11. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Forklift (P-APBD)	1.445.800.000,00	80	450.440.000,00	31,13
	12. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Cangkang Perikanan Samudra (P-APBD)	2.450.000.000,00	100	1.982.784.000,00	80,9
	13. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Scaffolding (P- APBD)	1.044.040.000,00	100	933.853.000,00	89,45
1.07.2.07.10.1.07.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	856.057.000,00	100	664.171.133,00	77,58
1.07.2.07.10.1.07.4.02.01	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/kota	227.484.000,00	100	96.875.256,00	42,59
1.07.2.07.10.1.07.4.02.01.02.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	227.484.000,00	100	96.875.256,00	42,59
1.07.2.07.10.1.07.4.02.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	628.573.000,00	100	567.295.877,00	90,25
1.07.2.07.10.1.07.4.02.03.02.03.01	Pembinaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	134.320.000,00	100	118.975.000,00	88,58
1.07.2.07.10.1.07.4.02.03.02.03.02	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	494.253.000,00	100	448.320.877,00	90,71
1.07.2.07.10.1.07.5	Program Hubungan Industrial	1.328.810.000,00	96,78	877.548.523,00	65,04
1.07.2.07.10.1.07.5.02.01	Penanganan Pertisuan Perusahaan Dan Pendataan Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya	779.485.000,00	100	529.422.118,00	67,93
1.07.2.07.10.1.07.5.02.01.02.01.03	Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	779.485.000,00	100	529.422.118,00	67,93
1.07.2.07.10.1.07.5.02.02	Penanganan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di	549.485.000,00	92,2	348.126.411,00	63,36
1.07.2.07.10.1.07.5.02.02.02.02.02	Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah	376.010.000,00	100	250.182.813,00	66,18
1.07.2.07.10.1.07.5.02.02.02.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	171.385.000,00	75	97.943.600,00	57,14
1.32.2.07.10.1.32.1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	149.271.200,00	100	114.889.164,00	75,97
1.32.2.07.10.1.32.1.02.01	Penataan Perebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	149.271.200,00	100	114.889.164,00	75,97
1.32.2.07.10.1.32.1.02.01.02.01.02	Penyapan Lingkungan Hunian fisik, sosial, ekonomi bagi Penduduk Sempat Dan Transmigran	149.271.200,00	100	114.889.164,00	75,97